



THE EFFECT OF BUDGET RATIONALIZATION ON THE WORK PROGRAM OF KONI BENGKULU PROVINCE IN 2020

PENGARUH RASIONALISASI ANGGARAN TERHADAP PROGRAM KERJA KONI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

Dendi Afrizal¹⁾; Ahmad Soleh²⁾; Rinto Noviantoro³⁾

¹⁾Study Program of Management Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

^{2,3)} Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Dendiafrizal@gmail.com ¹⁾ ahmadsolehse81@yahoo.co.id ²⁾ rintonoviantoro@yahoo.co.id ³⁾

How to Cite :

Afrizal, D., Soleh, A., Noviantoro, R. (2020). PENGARUH RASIONALISASI ANGGARAN TERHADAP PROGRAM KERJA KONI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020. *EMAK: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4).DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [21-08-2020]

Revised [05-09-2020]

Accepted [28-10-2020]

KEYWORDS

Budget Rationalization, work program

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja pada KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020.

Hasil menunjukkan bahwa Rasionalisasi Anggaran mempunyai pengaruh terhadap Program Kerja pada KONI Provinsi Bengkulu, Hal ini dibuktikan dari analisa regresi linier sederhana $Y = 2.631 + 0.846X$ dengan koefisien regresi variabel X sebesar 0.846 serta konstanta sebesar 2.631, dibuktikan dengan uji hipotesis dengan $t_{sig} < t_a$ yaitu $0.000 < 0.05$. Dari uji yang berarti bahwa koefisien korelasi didapat nilai $r = 0.714$. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja sangat kuat, karena nilai korelasi mendekati angka 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasionalisasi Anggaran mempunyai hubungan yang kuat terhadap Program Kerja pada KONI Provinsi Bengkulu. Dari uji hipotesis di dapat nilai t_{sig} variable sebesar 0.000. Nilai ini jika dibandingkan dengan $t_a = 0.05$ maka $t_{sig} < t_a (0.000 < 0.05)$.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of budget rationalization on the work program at KONI Bengkulu Province in 2020.

The results show that Budget Rationalization has an influence on the Work Program at KONI Bengkulu Province, it is shown from simple linear regression analysis $Y = 2.631 + 0.846X$ with X variable regression coefficient 0.846 also constant 2.631, it is proved with hypothesis with $t_{sig} < t_a$, it is $0.000 < 0.05$. from the test, it shows that correlation coefficient $r_{value} = 0.714$. this value shows that the correlation between budget realization with work program is very strong because it has correlation value close to 1. So it can be concluded that budget

rationalization has strong correlation with work program at KONI in Bengkulu Province. From hypothesis test, the t_{sig} variable value is 0.000. this value if compared with t_α=0.05 so t_{sig}<t_α(0.000<0.05)..

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara untuk lebih majudi laksanakan melalui pembangu nannasional secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi.Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumberdaya dalam menciptakan kenaikan pendapatan padasektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode.Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat.Anggaranbelanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensisum berdaya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah.Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Perencanaan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan oleh pemerintah.Dari perencanaan itu proses/kegiatan pembangunan berjalansesuai dengan arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi pusat perhatian bagi semua pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan.Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latarbelakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum.

Nordiawan, dkk (2012:4) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dalam badan pemerintahan.Sadeli (2015:6) menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional accounting,mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya.Akuntansi pemerintahan diatur dalam PP. No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

Kuangan Daerah menurut abdul halim (2012:43) yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh

pihak-pihak eksternal pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995:20).

Di tahun 2020 ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sedang melakukan rasionalisasi anggaran terkait pandemi COVID 19 atau Virus Corona yang telah menyerang seluruh dunia, sehingga berdampak terhadap anggaran kegiatan di seluruh sektor. Yang mana dengan rasionalisasi ini, pemerintah setempat mengurangi pagu anggaran di setiap dinas dengan meniadakan program kerja yang telah dicanangkan atau tetap mengadakannya dengan menggeser keposanggaran yang ada. Anggaran lebih di fokuskan untuk dinas kesehatan untuk penanganan virus Corona sehingga dengan kebijakan atau program ini, pemerintah setempat harus beradaptasi lagi agar dapat melaksanakan setidaknya 90% program kerja yang telah dicanangkan.

LANDASAN TEORI

Rasionalisasi

Menurut Annisya et al., (2016:1) rasionalisasi adalah perilaku yang menolerir atau memperbolehkan individu melakukan kecurangan dan berasumsi bahwa tindakan tersebut hal yang biasa dan wajar. Rasionalisasi juga didefinisikan sebagai bentuk sikap dan proses berfikir yang didasari dengan berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalkan perilaku kecurangan dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya, Apriadi (2014:2). Kemudian Ratmono et al., (2014:1) menyatakan bahwa rasionalisasi berkaitan dengan sikap dan kepribadian seseorang dalam membenarkan nilai-nilai etis yang sebenarnya menyimpang.

Rasionalisasi anggaran secara umum diatur dalam peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan konsep otonomi daerah, semua program yang berhubungan dengan daerah telah diserahkan secara penuh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama anggota legislatif menguatkannya dalam bentuk perda.

Anggaran

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual yang dicapai.

Definisi anggaran menurut Peraturan Pemerintahan No. 24 tahun 2005 adalah bahwa pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang di ukur dalam satuan, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Mahsun (2016: 145), "Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter." Selanjutnya Mardiasmo (2014: 61) menjelaskan "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial."

Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran merupakan alat dalam manajemen yang memberikan petunjuk mengenai beberapa perkiraan yang tersedia pada suatu saat dan untuk beberapa lama, tujuan penyusunan anggaran dalam setiap perusahaan pada dasarnya sama, yaitu merencanakan posisi anggaran untuk suatu periode tertentu yang akan datang

Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:

1. Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian.
2. Sebagai suatu alat untuk mengestimasi semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan di masa yang akan datang.
3. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan

Karakteristik Anggaran

Menurut Mulyadi (2016:490) ada beberapa karakteristik anggaran yaitu:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.
2. Umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun

3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan anggaran.
4. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Program Kerja

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Prasetyani (2012:29), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai *"Whatever government choose to do or not to do"*. Hal tersebut diperkuat oleh Ngalimun (2016:3) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (2014:8), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakankebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Program Rencana Kerja

Menurut Gunawan Adisaputro (2014:309) perencanaan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :

1. Perencanaan sebagai pengarah untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi.
2. Perencanaan meminimalisasi ketidakpastian, karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi organisasi atau perusahaan.
3. Perencanaan meminimalisasi pemborosan sumber daya, setiap organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan sumber daya. Dengan adanya perencanaan sebuah organisasi atau perusahaan diawal sudah melakukan

perencanaan melalui penggunaan sumber daya. Sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi tersebut, bisa meningkatkan tingkat efisiensinya. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya, dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan berusaha membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan, dan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan

Menurut Heckert dan Willson yang diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk (2014:125-126) jenis perencanaan dapat dibedakan menjadi :

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Fokus perencanaan ini adalah organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai rencana secara umum yang menggambarkan alokasi sumberdaya, prioritas, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak.

2. Perencanaan Taktis

Perencanaan taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (1-5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis. Perencanaan taktis biasanya di buat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah. Tujuan taktis biasanya diturunkan dari tujuan strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana strategis menstabilkan suplai bahan baku. Rencana taktis kemudian dikembangkan melalui pembelian bahan baku dari perusahaan pemasuplai bahan baku untuk produksi perusahaan.

3. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek (kurang dari 1 tahun) dan melibatkan manajemen tingkat bawah

Rencana Kerja KONI

Dalam isi UUD tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan pada BAB VII untuk pembinaan dan pengembangan olahraga dibutuhkan Organisasi yang

menaungi dalam bidang olahraga yang dapat menjadi wadah untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, provinsi, maupun nasional dalam uraian tersebut ada pada pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. Robbins (2015:24) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang bekerja secara terus menerus demi tercapainya sebuah tujuan, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Handoko (2015:92) bahwa untuk mencapai sebuah tujuan diperlukannya proses pengorganisasian dan proses ini tercermin dalam struktur organisasi. Oleh karena itu dibentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mencapai sebuah tujuan prestasi olahraga dan pengembangan olahraga, dalam AD ART KONI Bab I pasal 4 tentang Status ayat 1 menyatakan bahwa :

KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KONI Provinsi Bengkulu adalah Organisasi olahraga yang bertanggung jawab membina sekaligus mengelola perkembangan olahraga di wilayah Daerah atau Kabupaten sedangkan kondisi manajemen KONI Provinsi Bengkulu sudah cukup baik dapat dilihat dari pembentukan struktur organisasi selain itu dengan adanya program jangka panjang dan pendek yang tersusun dengan baik dalam jangka waktu kepengurusan. Pengurus KONI Provinsi Bengkulu periode 2017 - 2021 dibentuk oleh tim formatur yang dipilih langsung oleh Ketua yang terpilih. Handoko (2015:92) mengemukakan bahwa penyusunan personalia dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi agar orang-orang yang masuk pada posisi struktural yang tepat. KONI Provinsi Bengkulu dalam memilih anggota pengurus dari berbagai bidang seperti pengusaha, pejabat, praktisi olahraga, dan kalangan birokrasi, dikarenakan untuk membangun pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Bengkulu diperlukannya kerjasama dari berbagai kalangan agar tercapai kemajuan dalam pembinaan dan perkembangan olahraga di Provinsi Bengkulu. Handoko (2015:95) dalam bukunya Manajemen menjelaskan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dibutuhkannya koordinasi yang baik. KONI Provinsi Bengkulu sudah menjalankan koordinasi yang baik dan rapat dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berfungsi untuk mengetahui kendala-kendala dalam pembinaan pada setiap cabang olahraga selain itu KONI Provinsi Bengkulu juga melakukan rapat pengurus internal KONI Provinsi Bengkulu sedangkan ketika mendekati kejuaraan sering diadakannya rapat karena untuk mempersiapkan dalam ajang kejuaraan yang ada atau yang akan diadakan oleh KONI Provinsi Bengkulu. Dalam pembagian anggaran dana pembinaan disesuaikan dengan prestasi dan aktivitas pada setiap cabang olahraga untuk itu pada setiap cabang

olahraga anggaran dana pembinaan berbeda-beda, untuk menunjang keaktifan cabang olahraga yang dinanungi oleh KONI Provinsi Bengkulu, KONI mewajibkan pada setiap cabang olahraga untuk mengadakan kejuaraan tingkat kabupaten minimal setahun sekali disamping itu untuk mencari bibit atlet yang berkompetensi pada cabang olahraga tersebut

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dianalisis menggunakan statistik dengan langkah-langkah berikut, yaitu :

- a. Untuk melihat pengaruh Variable (X) terhadap Variabel (Y) maka digunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1$$

Dimana:

Y = Program Kerja

a = Konstanta.

b = Koefisien variabel X

X = Rasionalisasi Anggaran

- b. Untuk melihat hubungan kedua variabel hipotesis di terima atau tidak perlu dibuktikan dalam mengambil langkah-langkah :
 1. Variabel X Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Variabel Y atau $t_{sig} > \alpha$ (0,05) Hipotesis diterima Variabel X Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y, Singgih (2003).
 2. Variabel X Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y atau $t_{sig} < \alpha$ (0,05) Hipotesis diterima Variabel X Secara Parsial Tidak Berpengaruh Terhadap Variabel Y, Singgih (2003).
- c. Untuk menguji hipotesis variable X terhadap variable Y, Uji Hiptesis dengan Uji t yakni pengujian hipotesis variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau satu per satu, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{b1}{sb1}$$

dimana :

t = Hipotesis

b1 = Koefisien

sb1 = Standar Koefisien

Dalam pengujian hipotesis penelitian akan dilakukan tabulasi dengan menggunakan software computer excel for statistic dan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini terikat dengan validitas konstruksi. Validitas konstruksi ini lebih terarah pada pernyataan mengenai apa sebenarnya yang diukur dengan alat pengukur yang ada (Setiaji, 2004:59). Validitas instrumen diuji dengan cara membuat kolerasi antar skor setiap item dengan skor item total. Dengan penilaian, instrumen pertanyaan dinyatakan valid jika hasil korelasi dari rhitung lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0.30.

Hasil uji validitas variabel Rasionalisasi Anggaran, dan Program Kerja dengan menggunakan rumus *korelasi product moment*, (lampiran X dan XI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Rasionalisasi Anggaran dan Program Kerja

Variabel	Butir Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Rasionalisasi Anggaran	Pertanyaan 1	0.676	0.30	Valid
	Pertanyaan 2	0.650	0.30	Valid
	Pertanyaan 3	0.705	0.30	Valid
	Pertanyaan 4	0.713	0.30	Valid
	Pertanyaan 5	0.707	0.30	Valid
Program Kerja	Pertanyaan 1	0.723	0.30	Valid
	Pertanyaan 2	0.703	0.30	Valid
	Pertanyaan 3	0.672	0.30	Valid
	Pertanyaan 4	0.708	0.30	Valid
	Pertanyaan 5	0.693	0.30	Valid

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Dari hasil uji validitas di atas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel bebas (Rasionalisasi Anggaran), dan variabel terikat (Program Kerja) adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung yang lebih besar dari pada nilai r tabel. Sehingga pertanyaan ini dapat diselesaikan

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah pengukuran yang kita buat reliable atau tidak. Suatu konstruk atau variabel jika memberikan nilai *cronbach alpa* dari r_{tabel} (Setiaji, 2014:59). Artinya koefisien *cronbach alpa* (I) realibel dan diterima item-item pertanyaan jika koefisien $I > r_{tabel}$. Dan diterima item-item

pernyataan jika koefisien $I > r_{\text{tabel}}$. Suatu instrument dinyatakan reliable jika koefisien I lebih besar atau sama dengan 0,60 (Setiaji,2014:67).

Hasil uji reliabelitas dengan menggunakan *cronbach alpa* (lampiran X dan XI) dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Rasionalisasi Anggaran dan Program Kerja

No	Variabel	Cronbach alpa (I)	r tabel	Keterangan
1	Rasionalisasi Anggaran	0.814	0.60	Reliabel
2	Program Kerja	0.763	0.60	Reliabel

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Analisis Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja pada Program Kerja KONI Provinsi Bengkulu Sangat bergantung kepada anggaran yang di siapkan oleh pemerintah daerah Bengkulu. Adapun hasil analisisnya (lampiran XII) adalah seperti pada tabel 3. berikut ini :

Tabel 3.Regresi Pengaruh Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.631	2.876		.915	.366
X	.846	.135	.714	6.279	.000

Sumber : Hasil Penelitian diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan variabel Y atas X dirumuskan dengan $Y = a + bx$. Maka diperoleh persamaan $Y = 2.631 + 0.846x$ dari persamaan tersebut dapat diartikan nilai regresi Rasionalisasi Anggaran = $2.631 + 0.846$ (Rasionalisasi Anggaran). Artinya persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan satu satuan variabel Program Kerja akan memberikan pengaruh terhadap Program Kerja sebesar 0.846 sedangkan nilai konstanta sebesar 2.631 mempunyai arti apabila Rasionalisasi Anggaran (X) sama dengan 0 maka Program Kerja (Y) akan tetap 2.631 hal ini hanya berlaku saat dilakukan penelitian.

Dari hasil perhitungan nilai R^2 dapat dilihat seperti pada tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. Tabel Nilai R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.509	.496	2.06376

Sumber : Hasil Penelitian diolah 2020

Korelasi R = 0.714 atau 71,4% menunjukkan hubungan antara Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja. Sumbangan pengaruh Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja R² = 0.509 atau 50.9 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Hasil uji hipotesis diperoleh hasil diterima atau Rasionalisasi Anggaran (X) berpengaruh signifikan terhadap Program Kerja (Y). Uji hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa Rasionalisasi Anggaran akan berpengaruh terhadap Program Kerja pada KONI Provinsi Bengkulu, semakin banyak anggaran yang tersedia maka semakin baik program akan terlaksana.

Diketahui persamaan regresi $Y = 2.631 + 0.846X$. Persamaan regresi linier sederhana yang bermakna, bahwa jika variabel Rasionalisasi Anggaran (X) sama dengan nol, maka tingkat terlakansanya Program Kerja (Y) sebesar konstanta yaitu 2.631. Hal ini berlaku saat diadakannya penelitian. Koefisien b = 0.846 ini berarti Rasionalisasi Anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap Program Kerja.

Uji koefisien korelasi didapat nilai $r=0.714$. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja positif dan kuat, karena nilai korelasi mendekati angka 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasionalisasi Anggaran mempunyai hubungan positif dan kuat terhadap program kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rasionalisasi Anggaran mempunyai pengaruh terhadap Program Kerja pada KONI Provinsi Bengkulu, Hal ini dibuktikan dari analisa regresi linier sederhana $Y = 2.631 + 0.846X$ dengan koefisien regresi variabel X sebesar 0.846 serta konstanta sebesar 2.631, dibuktikan dengan uji hipotesis dengan $t_{sig} < t_{\alpha}$ yaitu $0.000 < 0.05$. Dari uji yang berarti bahwa koefisien korelasi didapat nilai $r=0.714$. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja sangat kuat, karena nilai korelasi mendekati angka 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasionalisasi Anggaran mempunyai hubungan yang kuat terhadap Program Kerja pada KONI Provinsi Bengkulu. Dari uji hipotesis didapat nilai t_{sig} variabel jansostek sebesar 0.000. Nilai ini jika dibandingkan dengan $t_{\alpha}=0.05$ maka $t_{sig} < t_{\alpha}(0.000 < 0.05)$. Hasil perbandingan ini menunjukkan

bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya (H_a) dapat diterima, artinya ada pengaruh antara Rasionalisasi Anggaran terhadap Program Kerja pada KONI Provinsi Bengkulu.

Saran

1. Agar lebih mempertimbangkan dalam melakukan rasionalisasi anggaran supaya dapat lebih memberikan kesiapan untuk menyelesaikan program kerja yang telah di siapkan.
2. Hendaknya dengan program kerja yang telah dibuat oleh KONI Provinsi Bengkulu, maka untuk melaksanakan program tersebut harus di barengi dengan ketersediaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bactiar Arif, Muchlis dan Iskandar. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat I. C Lontaan. S. Pangarepan. 2016. Analisis Belanja Daerah. Jurnal EMBA. 4(1):898906.
- Dona, Gemellyrama, 2014. "Pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah dan Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Bengkulu", Jurnal, Bengkulu : Universitas Bengkulu.
- Ghozali, Imam. 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 21*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2019. Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, 2012. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rani, Elfreda, dan Suyatin. Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/55083-ID-analisis-kinerja-anggaran-dan-realisisasi.pdf>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Sugiantini Ayu. 2015. Kecenderungan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Buleleng. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi. 5(1):1-10.
- Zahara, Ami. (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru). Skripsi. Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang.